



Prosiding Seminar Nasional

“Pengembangan Profesionalisme Dosen dan Guru Indonesia”

<https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/index>

Vol 3, Tahun 2019 | Halaman 757-765

Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Jenjang SMP

Kota Surabaya

Isrida Yul Arfiana^{a, 1*}, Siti Nur Laila^{b, 2}, Nur Eva^{c, 3}, Endang Prastuti^{d, 4}

^a Program Studi S3 Psikologi Pendidikan Universitas Negeri Malang Indonesia

¹ isrida.1801139@student.um.ac.id* s.nurlaila.1801139@student.um.ac.id; nur.eva.fppsi@um.ac.id; endang.prastuti.fppsi@um.ac.id

Informasi artikel	ABSTRAK
Kata kunci: Evaluasi Pendidikan, Pendidikan Inklusif, Prinsip Inklusif.	Pendidikan inklusif pada dasarnya merupakan sebuah system yang memberikan kesempatan bagi seluruh peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan berdasarkan prinsip kebutuhan tiap individu. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota Surabaya sudah berjalan hampir satu dekade, implementasi pendidikan inklusif tentunya memiliki berbagai tantangan. Penelitian ini merupakan bagian dari evaluasi program yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian penyelenggaraan pendidikan inklusif berdasarkan aspek performansi, penilaian konsumen, penilaian fungsional dan penilaian pribadi. Metode yang digunakan ialah melalui teknik wawancara dan kuisioner. Sumber informasi dalam penulisan artikel ini berdasarkan pernyataan dari Guru Regular, Guru Pendamping Khusus serta orangtua siswa. Hasil analisa penyelenggaraan inklusif menunjukkan bahwa proses pemberian layanan masih ditemukan permasalahan khususnya dalam penyusunan kurikulum individual bagi siswa ABK serta hal-hal yang berkaitan manajemen SDM di sekolah inklusif.

Copyright © 2019 Isrida Yul Arifiana¹, Siti Nur Laila², Nur Eva³, Endang Prastuti⁴. All Right Reserved

Pendahuluan

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di berbagai sekolah tingkat pertama Kota Surabaya telah berjalan hampir 10 tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Terkait dengan pentingnya penyelenggaraan pendidikan inklusi maka memperhatikan keberagaman peserta didik merupakan condition sine qua non, agar semua peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang memadai. Dengan berlandaskan, permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi, maka beberapa sekolah di kota Surabaya resmi memberlakukan program Pendidikan Inklusi. Program pendidikan inklusi bertujuan untuk menerapkan Education For All (EFA), di mana semua anak terutama anak berkebutuhan khusus (ABK) memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, pendidikan yang adil dan bermutu tanpa diskriminasi.

Sekolah inklusi merupakan sebuah proses transformasi dari prinsip keberagaman siswa dengan tujuan untuk meningkatkan semua pihak untuk terlibat aktif dalam aktifitas belajar di atas perbedaan budaya maupun perbedaan individu (UNESCO, 2009). Seluruh komponen dalam sekolah inklusif, merupakan jaringan pendukung yang berharga yang dibutuhkan dengan menghargai perbedaan serta mewujudkan iklim inklusif di sekolah secara menyeluruh (Ainscow, Dyson, Goldrick, & West, 2016). Terdapat beberapa hal yang harus diwujudkan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, diantaranya mulai dari infrastruktur di sekolah inklusif, SDM khususnya tenaga guru yang menjadi shadow teacher, kurikulum IEP bagi siswa ABK serta permasalahan lainnya yang berkaitan dengan dukungan sosial. Dukungan sosial khususnya yang berasal dari guru atau tenaga pengajar merupakan faktor yang paling penting diantara faktor lainnya. Karena sikap tenaga pengajar atau guru mampu memberikan dampak positif maupun dampak negatif dalam perkembangan anak (Elisa & Wrastar, 2013). Oleh karena itu, sketsa pendidikan inklusi menunjukkan berbagai faktor yang mesti harus diperhatikan keberlangsungan programnya. Untuk itu, pada dasarnya penting bagi tiap sekolah untuk melakukan evaluasi program pendidikan inklusif di tiap sekolahnya masing-masing. Evaluasi yang dilaksanakan secara kontinyu oleh sekolah sangat penting untuk memodifikasi, mengurangi atau menghilangkan hambatan yang membatasi penyelenggaraan inklusi (Booth & Ainscow, 2011).

Faktanya, sekolah inklusif belum optimal dalam melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan inklusif yang berlangsung. Upaya untuk evaluasi setiap program yang dijalankan memang sudah berlangsung, meskipun belum berjalan optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, maka fokus penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program inklusi yang ada di sekolah. Acuan dalam evaluasi program yang digunakan, berdasarkan outcome measure selection categories diantaranya ialah aspek performansi, aspek penilaian konsumen, aspek penilaian fungsional dan aspek penilaian pribadi. Harapannya, dengan adanya evaluasi program pendidikan inklusif di sekolah tingkat pertama pada salah satu SMP di Kota Surabaya, maka dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait faktor-faktor yang dapat menjadi peluang maupun faktor yang menghambat di sekolah inklusif. Sehingga, nantinya hasil penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi upaya apa yang dilakukan oleh sekolah atau tindak lanjut oleh penulis dalam bentuk penelitian lanjutan dengan topik pendidikan inklusif.

Metode

Subjek Penelitian

Proses evaluasi program penyelenggaraan pendidikan inklusif dilakukan di salah satu sekolah inklusi yang berada di Kota Surabaya. Adapun subjek dalam evaluasi program sejumlah 6 orang, dengan rincian 3 guru GPK, 2 Guru Regular dan 1 orangtua siswa. Proses penentuan atau pemilihan subjek berdasarkan kriteria : 1) subjek penelitian merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah 2) bersedia untuk menjadi bagian dari penelitian.

Teknik Pengambilan Data Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian evaluasi program, sehingga acuan dalam proses mengambil data penelitian mengacu pada aspek *outcome evaluation* yaitu aspek performansi, aspek penilaian konsumen, aspek penilaian fungsional dan aspek penilaian pribadi. Teknik pengambilan data penelitian dengan wawancara dan pemberian kuisioner.

Instrumen Penelitian

Untuk melakukan evaluasi program penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP maka disusun instrument yaitu panduan wawancara serta kuisioner. Wawancara akan mengungkap beberapa aspek yang telah dijelaskan sebelumnya, meliputi performansi, penilaian konsumen, penilaian fungsional dan penilaian pribadi. Wawancara akan dilakukan dengan strategi wawancara informal. Dalam melakukan wawancara, juga dibantu dengan alat perekam suara untuk memudahkan proses pencatatan. Berikut daftar pertanyaan yang digunakan dalam proses penelitian :

Tabel 1. Panduan Wawancara

Aspek	Pertanyaan Wawancara
Aspek Performansi	a. Upaya apa yang dilakukan

<p>Aspek Penilaian Konsumen</p>	<p>sekolah untuk mewujudkan prinsip pendidikan inklusif?</p> <p>b. Apakah sekolah memiliki perencanaan jangka panjang dan jangka pendek terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif?</p> <p>c. Bisa dijelaskan terkait jumlah siswa ABK beserta Guru Pendamping Khusus yang ada di sekolah ?</p> <p>d. Bagaimana proses identifikasi awal untuk penerimaan siswa ABK ?</p> <p>e. Bagaimana gambaran karakteristik siswa ABK yang ada di sekolah? (perjelas jenis kekhususan)</p> <p>f. Bagaimana gambaran terkait kompetensi guru pendamping khusus ? (perjelas adakah kriteria penerimaan GPK)</p> <p>g. Upaya apa yang dilakukan sekolah guna meningkatkan kompetensi bagi guru GPK dan guru kelas ? (perjelas khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif)</p> <p>h. Upaya apa yang dilakukan oleh sekolah dalam menciptakan lingkungan yang support penyelenggaraan inklusif? (gali terkait lingkungan fisik, sarana prasarana serta lingkungan psikis seperti dukungan sosial dari komponen sekolah)</p> <p>i. Bagaimana keterlibatan dari orangtua khususnya ortu siswa ABK dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif?</p> <p>j. Apakah sekolah melibatkan pendukung lainnya (tenaga professional) guna penyelenggaraan inklusif?</p> <p>k. Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan pemerintah kota Surabaya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif?</p> <p>a. Apakah terdapat kebijakan terkait dengan evaluasi kepuasan penyelenggaraan injklusif dari pihak eksternak khususnya orangtua ?</p> <p>b. Bagaimana strategi yang diterapkan sekolah dalam</p>
--	---

	<p>mensosialisasikan nilai inklusif di sekolah?</p> <p>c. Upaya apa yang dilakukan sekolah dalam melakukan evaluasi pembelajaran di kelas? Komponen apa saja yang dievaluasi?</p> <p>d. Upaya apa yang dilakukan sekolah dalam melakukan evaluasi kinerja guru serta staff?</p>
Aspek Penilaian Fungsional	<p>a. Bagaimana cara guru mengetahui capaian akademis siswa ?</p> <p>b. Bagaimana gambaran terkait penyesuaian sosial siswa ABK terhadap siswa regular?</p> <p>c. Bagaimana gambaran terkait cara siswa dalam mengelola emosi ketika memiliki hambatan akademik dan sosial?</p>
Aspek Penilaian Pribadi	<p>a. Strategi apa yang dikembangkan oleh sekolah dalam mewujudkan lingkungan yang support bagi siswa ABK dan regular?</p> <p>b. Strategi apa yang dilakukan sekolah untuk mengevaluasi kebutuhan peserta didik, khususnya siswa ABK?</p> <p>c. Permasalahan apa saja yang sering muncul berkaitan dengan hubungan antara siswa regular dengan siswa ABK?</p> <p>d. Strategi apa yang dikembangkan sekolah untuk mengatasi permasalahan tersebut, khususnya jika terdapat isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan?</p> <p>e. Strategi apa yang dikembangkan oleh sekolah untuk membuat Guru menjadi pribadi yang prososial dan memiliki semangat inklusi?</p>

Instrumen berikutnya, penulis menggunakan kuisioner yaitu *self assessment* yang juga disusun berdasarkan aspek performansi, aspek penilaian konsumen, aspek penilaian pribadi dan aspek penilaian fungsional. Instrumen tersebut di isi secara individual, dengan kriteria penilaian berdasarkan kriteria penilaian : (3) Telah diimplementasikan secara keseluruhan, (2) Telah diimplementasikan, namun belum sepenuhnya dan (1) Tidak diimplementasikan. Item pernyataan dalam self assessment terangkum dalam table berikut ini :

Tabel 2. Item Pernyataan Sel Assessment

Item Pernyataan
Infrastruktur secara fisik dan psikologis dikembangkan sekolah untuk membantu agar siswa saling berinteraksi
Sekolah memiliki sekumpulan konsep / nilai inklusif yang dikembangkan

<u>Sekolah memiliki SOP berkaitan dengan penyelenggaraan asesmen, penyusunan pembelajaran serta evaluasi pembelajaran bagi siswa ABK</u>
Model pembelajaran di kelas diselenggarakan dengan prinsip keterbukaan, menyenangkan, serta nyaman bagi semua siswa
<u>Budaya kelas dibentuk sedemikian rupa sehingga siswa merasa aman untuk berani bertanya, berpendapat dan berinteraksi satu sama lain</u>
Guru menggabungkan berbagai cara untuk mensosialisasikan nilai-nilai inklusif dalam kelas maupun luar kelas
<u>Sekolah berupaya untuk responsive terkait isu-isu yang berkaitan dengan tindakan kekerasan di sekolah yang menyalahi nilai-nilai inklusi</u>
<u>Kebijakan dan peraturan sekolah berkaitan dengan penyelenggaraan inklusif dikembangkan dengan melibatkan seluruh komponen</u>
<u>Terdapat kebijakan yang dikembangkan terkait penggunaan PPI di sekolah inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus</u>
<u>Terdapat kebijakan berkaitan kegiatan yang berupaya membangun kolaborasi antara orangtua dengan guru di sekolah</u>

Hasil dan pembahasan

Subjek dalam penelitian ini terbagi dalam 2 kelompok yaitu kelompok guru dengan inisial nama IY, LD, WN, RK, SR dan AN serta kelompok orangtua siswa yaitu dengan inisial nama UK. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi yang terbagi dalam beberapa aspek diantaranya ialah :

a) Tersedianya Infrastruktur dan Proses Penerimaan Siswa Baru di Sekolah

Upaya sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif salah satunya tercermin dengan kesediaan infrastruktur yang menunjang pelayanan. Sekolah Inklusi SMP X memiliki alat peraga maupun penunjang infrastruktur dalam bentuk jalan untuk siswa tuna netra, siswa dengan cacat fisik serta toilet bagi siswa berkebutuhan khusus. Proses penerimaan siswa berkebutuhan khusus juga telah disesuaikan dengan tools asesmen yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Proses pendaftaran dalam PDBK juga menggunakan system zonasi sesuai ketentuan dari Pemkot Surabaya. Dalam proses penerimaan siswa, petugas yang terlibat hanya guru pendamping khusus. Salah satu guru yaitu WN menyebutkan dengan hanya melibatkan guru GPK dalam asesmen terkadang kurang optimal karena seharusnya juga melibatkan guru regular.

b) Kompetensi SDM Sekolah Inklusi

Guru atau tenaga pengajar di SMP X Kota Surabaya berlatar belakang S1 Pendidikan Luar Biasa dan S1 Psikologi. Proses seleksi dan rekrutmen GPK dikelola oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Upaya sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif juga tercermin dalam peningkatan kompetensi guru GPK, dengan melibatkan mereka untuk mengikuti workshop yang diadakan oleh pemkot Surabaya atau pihak instansi lain. Selain itu, menurut Subjek IY menyatakan bahwa GPK juga bergabung dalam bentuk MGPK yang diikuti GPK SMP seluruh kota Surabaya. Dengan adanya wadah MGPK membuka kesempatan untuk diskusi terkait hambatan yang muncul pada setiap sekolah. Selain itu, sekolah juga memiliki guru berbagai latar belakang bidang akademik sejumlah 32 guru.

c) Karakteristik Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah

Sekolah berupaya untuk menerima semua jenis kekhususan siswa, namun karena proses penerimaan juga menggunakan system zonasi maka menurut guru (WN dan LD) karakteristik siswa pada tiap tahun ajaran hampir sama. Diantaranya siswa yang diterima memiliki kondisi retardasi mental, slow learner, autis, down syndrome dan low vision. Presentase jumlah siswa berkebutuhan khusus yang aktif saat ini dijelaskan dalam bagan berikut ini :

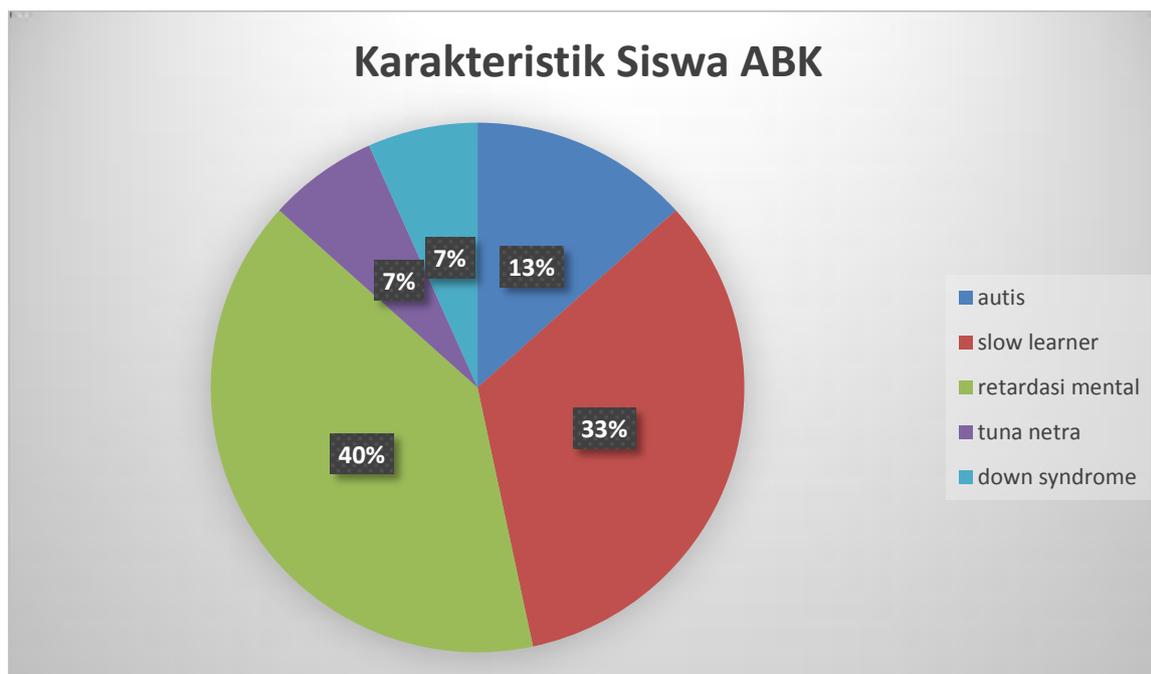


Diagram 1. Karakteristik siswa ABK

d) Upaya Membangun Iklim Inklusif

Untuk mensosialisasikan nilai-nilai inklusif, sekolah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan memberikan pengarahan saat upacara. Selain itu, sekolah juga mengadakan pertemuan orangtua di awal semester untuk mensosialisasikan nilai-nilai inklusif yang dikembangkan sekolah. Upaya lain juga dilakukan oleh sekolah dengan meminta seluruh komponen Guru untuk menjelaskan inklusi seperti apa dan bagaimana memperlakukan siswa berkebutuhan khusus.

e) Keterlibatan Aktif Orangtua Siswa Berkebutuhan Khusus

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh orangtua, bahwa sekolah memiliki beberapa aktifitas yang melibatkan orangtua diantaranya kegiatan parenting bagi orangtua siswa ABK. Orangtua juga merasakan adanya manfaat dari kegiatan tersebut karena membantu mereka dalam mengasuh serta mendidik anak ketika di rumah. Di sisi lain, guru SR menyatakan upaya yang dilakukan sekolah juga sebagai bagian dari peningkatan kolaborasi aktif antara guru dengan orangtua.

f) Dukungan Pemerintah dan Tenaga Profesional

Upaya pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah tercermin dalam bantuan berupa alat peraga maupun dana operasional. Selain itu, pemerintah juga aktif menyelenggarakan workshop bagi guru untuk peningkatan kompetensi di bidang pendidikan inklusif. Pemerintah juga menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memfasilitasi minat siswa seperti agenda tahunan lomba bagi siswa berkebutuhan khusus. Sedangkan sekolah, juga bekerjasama dengan tenaga profesional di beberapa Universitas khususnya dalam kegiatan asesmen ABK.

g) Kurikulum dan Evaluasi Pembelajaran

Pembuatan kurikulum PPI pada dasarnya belum berjalan dengan optimal, namun guru pendamping khusus membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang terkait pelaksanaan pembelajaran bagi siswa ABK. Guru pun menyusun bank soal sesuai dengan kondisi siswa sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran. Beberapa paket soal diklasifikasikan ke dalam beberapa model, paket A,B,C,D. Misalnya

kategori A setara dengan soal-soal di level kelas 5 SD. Subjek WN juga menyatakan bahwa selama ini yang menyusun PPI lebih banyak dilakukan oleh GPK. Padahal proses penyusunannya akan lebih efektif jika disusun bersama dengan guru reguler (guru bidang studi).

h) Evaluasi Kinerja Guru

Evaluasi kinerja guru secara khusus untuk guru GPK dilakukan oleh coordinator inklusi. Komponen dalam evaluasi biasanya mencakup kedisiplinan, kompetensi bidang inklusi, kerjasama, keaktifan dan cara mengajar. Proses evaluasi kinerja guru, juga sudah berbasis teknologi informasi. Melalui aplikasi berbasis web SIAGUS, guru melaporkan kinerja yang telah dilakukan dan mendapatkan poin sesuai dengan ketentuan.

i) Kebijakan Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

SMP X memiliki kebijakan khusus dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, diantaranya kebijakan sekolah tentang pedoman untuk asesmen ABK, pedoman dalam menyusun PPI serta aturan-aturan yang harus dipahami berdasarkan nilai inklusif. Namun, pedoman tersebut belum tercetak atau tertempel di lingkungan sekolah. Pedoman tersebut hanya diketahui oleh coordinator inklusi dan beberapa GPK.

j) Isu-Isu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Subjek Penelitian yaitu GPK SR, LN dan WN mengungkapkan bahwa awal penyelenggaraan sekolah inklusif isu yang muncul ialah terkait penerimaan dan kesiapan guru dalam mengelola kelas inklusif. Guru reguler merasa tidak mampu untuk menghadapi siswa ABK. Isu lainnya yang muncul tentang tindakan bullying yang dilakukan siswa normal pada siswa ABK. Namun, masalah tersebut ditindaklanjuti dengan berbagai peningkatan program yang dilakukan sekolah.

Berdasarkan pembagian kuisioner, menunjukkan hasil terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif yang terangkum dalam diagram berikut :

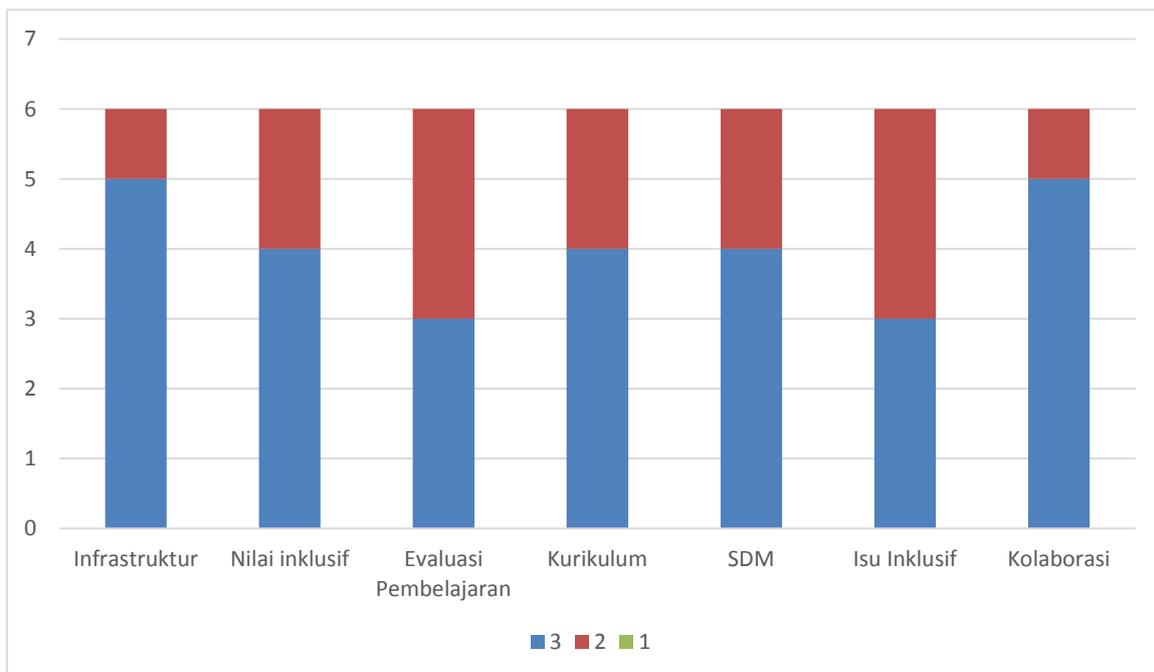


Diagram 2. Penyelenggaraan pendidikan inklusif

Dari hasil *self assessment*, diperoleh gambaran bahwa sebagian responden menyatakan bahwa kebijakan atau program yang telah dilakukan sekolah sudah di implementasikan secara keseluruhan khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur, nilai inklusif, kurikulum serta SDM dan kolaborasi aktif antara guru dan orangtua.

Secara keseluruhan dari hasil pengambilan data, menunjukkan bahwa aspek performansi merujuk pada proses asesmen penerimaan siswa berkebutuhan khusus serta upaya sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi sudah berjalan dengan optimal. Ditunjukkan dengan keseriusan sekolah untuk menyediakan sarana prasarana serta proses identifikasi ABK berdasar ketentuan dari Pemerintah. Selain itu, kesiapan sekolah juga tercermin dalam kualifikasi SDM yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab di sekolah inklusi. GPK terdiri dari guru-guru yang memiliki latar belakang pendidikan S1 Pendidikan Luar Biasa dan S1 Psikologi. Model pembelajaran yang diterapkan di sekolah, sebagian besar menggabungkan siswa ABK dengan siswa normal. Namun, karean terbatasnya tenaga GPK terkadang memunculkan masalah yaitu ketidaksiapan guru regular sehingga melimpahkan siswa untuk belajar di ruang sumber. Padahal, seharusnya sesuai dengan prinsip inklusi seharusnya siswa ABK dapat belajar dan bekerja sama dengan siswa normal. Guru pun dapat memanfaatkan siswa normal sebagai bagian dari pendampingan bagi siswa ABK, misalnya dalam model tutor sebaya. Isu-isu lainnya berkaitan dengan aspek performansi muncul dalam usaha yang dilakukan sekolah untuk mensosialisasikan nilai-nilai inklusif. Misalnya, dilakukan saat upacara maupun saat kegiatan belajar di kelas. Namun demikian, isu terkait masalah tindakan bullying yang dilakukan oleh siswa regular/normal juga muncul setiap tahun ajaran baru. Aspek penilaian konsumen, secara khusus sekolah belum pernah melakukan aktifitas evaluasi penilaian program yang dilakukan sekolah pada konsumen (orangtua atau alumni). Tapi, penulis melakukan wawancara singkat dengan orangtua ABK yang menyatakan bahwa sebenarnya orangtua memiliki manfaat dengan mengikuti kegiatan parenting yang dilakukan sekolah. Orangtua juga menyatakan kesiapan untuk terlibat aktif dalam kegiatan inklusi. Aspek penilaian fungsional dan pribadi menyebutkan bahwa di SMP X secara kontinyu melakukan evaluasi terkait capaian akademik siswa berkebutuhan khusus. Tentunya, dalam penyusunan target yang harus dicapai disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Tenaga pengajar khususnya guru GPK juga memiliki upaya untuk mengatasi masalah psikologis yang dimunculkan siswa ABK.

Secara umum, evaluasi program penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah X Kota Surabaya telah berjalan sesuai dengan optimal. Meskipun, isu terkait penyusunan kurikulum PPI serta keterbatasan SDM masih menjadi komponen yang perlu untuk diotimalkan. Tentunya dengan semangat serta komitmen kuat maka sekolah akan mampu menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan optimal. Hal ini sejalan dengan Allison (2016) yang menyatakan ada berbagai faktor yang secara signifikan berhubungan dengan implementasi keajaiban dalam pengaturan sekolah dan kelas termasuk: kesadaran akan persyaratan Kebijakan; penjadwalan; pengawasan; penggunaan sumber daya yang mendukung; persepsi bahwa kebijakan realistis dan dapat direngkuh; dan hambatan spesifik dalam pelaksanaan.

Simpulan

Evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi di SMP X Kota Surabaya menunjukkan bahwa dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusi telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan atau aturan Pemerintah. Aspek yang berkaitan dengan upaya sekolah, tujuan sekolah, guru kelas, guru pendamping khusus (GPK), fasilitas, peserta didik, dan kolaborasi orangtua. Dari berbagai aspek ini menunjukkan bahwa semua telah sesuai namun guru pendamping khusus belum maksimal dalam mendampingi anak di sekolah karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh guru. Akibat dari minimnya jumlah GPK yang ada di sekolah inklusi. Proses berkaitan dengan implikasi kurikulum, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi belajar. Ini belum berjalan dengan optimal, karena PPI tiap individu belum dikembangkan sesuai dengan panduan yang ada. Namun, proses evaluasi dan strategi pembelajaran berjalan optimal. Selanjutnya, proses evaluasi output sekolah belum maksimal karena sekolah tidak memiliki kebijakan dalam evaluasi berdasarkan aspek penilaian konsumen.

Referensi

Ainscow, M. (2016). Diversity and equity: A global education challenge. *New Zeland Journal of Educational Studies*, 51(2), 143–155. <https://doi.org/10.1007/s40841016-0056-x>.

Alisson, K. R., Vu-Nguyen, K., Ng., B., Schoueri-Mychasiw N, Dwyer, JJ., Manson, H, Hobin, E., Manske, S., Robertson, J. 2016. “Evaluation of Daily Physical Activity (DPA) policy implementation in Ontario: surveys of elementary school administrators and teachers”. *Springer Journal: BMC Public Health*,16 (1): 746

Booth, T., & Ainscow, M. (2011). *Index for Inclusion: Developing learning and participation in schools (Revised 2011)* (3rd ed.). Bristol: CSIE.

Elisa, Syafrida & Wrastari, Aryani Tri. 2013. “Sikap Guru Terhadap Pendidikan Inklusi Ditinjau dari Faktor Pembentuk Sikap”. *Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pendidikan*, 2(2): 1:10.